

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MELAYU  
TAHUN 2008-2013**

DR. Hasanuddin, M.si Dan Triananda Putri  
Email: Trianandaputri\_pu3@yahoo.com  
Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Abstract :**

*Constitution of Indonesia is guaranteed about cultural vision on Article 28 paragraph (3) , Article 32 paragraph (1) and paragraph (2). Cultural aspects must be considered in the government's strategic policy development. Malay culture being identity of Pekanbaru city and want to be center of Malay culture. Achieving the vision set by well-directed strategy. Development of strategy should be considered to 7 elements of universal culture. In 2009, population of Pekanbaru dominated by Minang ethnic in the range of 37.7 % , while the ethnic Malays in the range of 26.1 % .Malay cultural as open characteristic make the process of acculturation not inevitable. The seriousness of the government in planning and implementing of development strategy Malay culture is needed to maintain identity of the city . Implementing strategy of culture development influenced by competency of human resources, affirmation of relevant institutions, availability of facilities and infrastructure and financial. However, strategy implementation couldn't be successful if civil society nothing participation for support this vision.*

**Keyword : Strategy, development of culture, Malay**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang Masalah**

Studi mengenai kebudayaan saat ini menjadi sorotan dunia terutama lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa yang disingkat dengan PBB. Melalui UNESCO, PBB memberikan himbuan kepada setiap negara untuk memperhatikan aspek kebudayaan pada pembangunannya. Hal ini karena budaya merupakan identitas atau jati diri dari suatu daerah. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan daerah. Keragaman budaya ini dihargai dan diakui oleh negara. Dalam dasar negara yakni Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 visi kebudayaan dimuat dengan sangat luas dan tegas pada pasal 28I ayat (3), pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau yang memiliki budaya melayu sebagai budaya aslinya. Dilatar belakangi secara historikal kota Pekanbaru tidak terlepas dari pengaruh kerajaan melayu tempo dulu yakni kerajaan Siak Sri Indrapura dan dengan nama Senapelan pada waktu itu kota Pekanbaru menjadi pusat perkembangan pemerintahan melayu pada masa Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah. Latar belakang secara historis ini membuat pemerintah kota Pekanbaru ingin mempertahankan dan menjadikan kebudayaan melayu

sebagai budaya tempatan dan menjadi identitas daerah. Oleh karenanya, pemerintah kota Pekanbaru mencantumkan visi kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah kota Pekanbaru. Meskipun visi kebudayaan memiliki payung hukum yang kuat yakni Undang Undang Dasar akan tetapi belum didukung oleh adanya peraturan daerah yang mengatur pengembangan kebudayaan melayu, terutama perda mengenai pengelolaan dan perawatan terhadap situs budaya. Sehingga mengakibatkan pelaksanaannya berjalan sangat lamban.

Visi kota Pekanbaru yang menginginkan kota Pekanbaru menjadi “pusat” kebudayaan Melayu seharusnya didukung oleh berbagai aktivitas pengembangan kebudayaan seperti kegiatan di lembaga kesenian, pembuatan kerajinan melayu serta praktek kebudayaan melayu dalam keseharian masyarakat. *Pertama*, kita akan melihat dari jumlah sanggar seni yang terdaftar sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 tidak ada perkembangan jumlah yakni hanya sekitar 19 sanggar seni sementara peningkatan jumlah penduduk tidak dapat dibendung dan pada tahun 2010 mencapai 897.768 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa rasio lembaga sanggar seni di kota Pekanbaru relatif rendah. *Kedua*, peningkatan harga jual kain tenun songket yang dikarenakan minimnya pengrajin kerajinan melayu. *Ketiga*, pesatnya arus modernisasi membuat praktek serta pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan melayu semakin tergores zaman.

Peninjauan terhadap strategi kebudayaan melayu harus dilakukan secara berkala oleh pemerintah kota Pekanbaru agar dapat mencapai visi sebagai pusat kebudayaan melayu pada tahun 2025.

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah kota Pekanbaru dalam mengembangkan kebudayaan melayu?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengembangan kebudayaan melayu di kota Pekanbaru?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Menganalisa strategi pemerintah kota Pekanbaru dalam mengembangkan kebudayaan Melayu.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pengembangan kebudayaan melayu di kota Pekanbaru.

## **4. Kerangka Teori**

### **A. Manajemen Strategik**

Manajemen strategik berhubungan dengan proses memilih strategi dan kebijakan dalam rangka upaya memaksimalkan sasaran organisasi. Strategi adalah

pola tindakan terpilih untuk mencapai tujuan tertentu. Pada pelaksanaan manajemen pemerintah daerah terdapat 5 strategi kebijakan publik yaitu; (1) Strategi Inti (Core Strategy), (2) Konsekuensi Strategi (Consequences Strategy), (3) Strategi Pelanggan (Customer Strategy), (4) Strategi Pengawasan (Control Strategy), dan (5) Strategi Kebudayaan (Culture Strategy). Manajemen strategik memiliki beberapa tahapan. Menurut Hunger dan Wheelen (1996:7) mengemukakan bahwa:

*“The process of strategic management involves four basic elements: (1) environmental scanning, (2) strategy formulation, (3) strategy implementation, and (4) evaluation and control.”*

Setiap upaya untuk mencapai tujuan strategi terdapat 5 faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilannya yakni:

1. Koordinasi yang baik antar lembaga yang terkait,
2. Aktor pembuat kebijakan (Kepemimpinan),
3. Kompetensi sumber daya manusia,
4. Pembiayaan, dan
5. Sarana dan prasarana.

## **B. Kebudayaan**

C. Kluckhohn menyebutkan bahwa unsur pokok kebudayaan terdapat 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *cultural universals*, yaitu; (1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, (2) Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, (3) Sistem kemasyarakatan, (4) Bahasa, (5) Kesenian, (6) Sistem pengetahuan dan pendidikan dan (7) Religi. Menurut Van Peursen, perkembangan kebudayaan dipengaruhi oleh strategi. Masyarakat yang bersifat terbuka cenderung lebih cepat mengalami perubahan dalam perkembangan kebudayaannya. Oleh karenanya, untuk mengontrol pergeseran terhadap nilai kebudayaan diperlukan keselarasan dalam setiap tahapan pada manajemen strategik agar pelestarian kebudayaan dapat tercapai.

## **5. Metode Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini ialah instansi pemerintah dan masyarakat kota Pekanbaru yang terkait dalam pengembangan visi kebudayaan kota Pekanbaru. Dengan terfokus pada strategi pengembangan visi kota Pekanbaru. Dimana Pemerintah ingin menjadikan kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu pada Tahun 2025.

### **a. Teknik Pengumpulan data**

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana

responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Kemudian hasil dari tanya jawab kepada informan kunci inilah yang akan dianalisis dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun informan pada penelitian ini ialah :

- a. M. Yusfen Hendry : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru
- b. Zulkarnain : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Pekanbaru
- c. Anis : Ketua Bidang Pembinaan Seni dan Budaya
- d. Buchari Mahmud : Wakil Ketua LAM Kota Pekanbaru
- e. Andika : Manager Sanggar Seni Laksamana
- f. Atun : Pengrajin Kerajinan Tenun Songket

## 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

## 3. Study Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini perlu dilakukan mengingat permasalahan yang diteliti berkaitan dengan peristiwa yang sudah berlalu, yakni strategi pemerintah kota Pekanbaru dalam pengembangan kebudayaan melayu pada tahun 2008-2013. Untuk itulah dengan data yang terdokumentasi di lokasi penelitian, informasi yang diperlukan bisa diperoleh, untuk melengkapi hasil wawancara dengan informan kunci.

### **b. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yakni dengan menggunakan model analisis interaktif dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dan secara langsung berinteraksi dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi seakurat mungkin. Data yang penulis peroleh selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif menurut teori dan kerangka pemikiran lalu disajikan dalam bentuk uraian pembahasan mengenai Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kebudayaan Melayu Tahun 2008-2013.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kebudayaan Melayu Tahun 2008-2013.

Menjadi pusat kebudayaan Melayu merupakan salah satu tujuan dari pemerintah kota Pekanbaru yang tercantum pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dilatarbelakangi secara historis maka pemerintah kota Pekanbaru ingin mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan melayu sebagai identitas daerah. Sejak tahun 2009, kemajemukan masyarakat kota Pekanbaru semakin terlihat dari persentase etnis yang terdiri dari Melayu (26,1%), Jawa (15,1%), Minang (37,7%), Batak (10,8%), Banjar (0,2%), Bugis (0,2%), Sunda (1,0%), dan suku-suku lainnya (8,8%). Persentase ini dilihat dalam Gambar berikut ini :

**Gambar 1. Kemajemukan suku bangsa di Kota Pekanbaru**



**Sumber: BAPPEDA Kota Pekanbaru**

Dengan semakin tingginya tingkat kemajemukan masyarakat kota, proses akulturasi kebudayaan akan semakin terlihat bahkan jika tidak adanya strategi yang tepat maka tidak dapat dihindari kota Pekanbaru akan semakin kehilangan identitas asli daerahnya yakni budaya Melayu. Visi kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan melayu memerlukan manajemen strategik yang baik untuk menghindari proses perubahan pada nilai kebudayaan setempat. Strategi pengembangan kebudayaan melayu yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru diarahkan pada 7 unsur pokok kebudayaan.

Pada rentang tahun 2008-2013 terdapat 2 masa kepemimpinan yang berbeda yakni pada tahun 2007-2011 berada pada masa kepemimpinan Drs. H. Herman Abdullah, MM, sementara pada tahun 2012-2017 berada pada masa kepemimpinan walikota H. Firdaus, ST, MT. Dalam manajemen strategik proses perencanaan dan pelaksanaan menjadi sorotan penelitian.

Tahun 2007-2011 Visi kota Pekanbaru ialah *“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan*

*Taqwa*“. Dengan tujuan meningkatkan apresiasi dan ekspresi masyarakat terhadap budaya melayu dan mewujudkan dalam keseharian penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan kondisi fisik Kota Pekanbaru dengan ciri-ciri khas budaya melayu maka sasaran pemerintah kota Pekanbaru ialah:

1. Meningkatnya apresiasi dan ekspresi masyarakat terhadap budaya melayu
2. Meningkatnya apresiasi seni peserta didik terhadap budaya melayu dalam kehidupan sehari-hari
3. Terciptanya kondisi fisik Kota Pekanbaru dengan ciri-ciri khas budaya melayu

Dengan sasaran ini pemerintah kota Pekanbaru mencanangkan strategi “Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya”. Oleh karenanya kebijakan pemerintah diarahkan pada: (1) Program Pengembangan Nilai Budaya, (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Selanjutnya pada tahun 2012-2017 visi kota Pekanbaru berubah menjadi “*Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani*” dengan tujuan Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat melayu maka sasaran pemerintah ialah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya melayu. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut maka pemerintah kota Pekanbaru merencanakan pencapaian dengan menggunakan strategi “Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal”. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah diarahkan pada:

1. Penguatan penggunaan simbol-simbol budaya melayu
2. Memfasilitasi penyelenggaraan seni dan event-event kebudayaan lokal
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelestarian budaya melayu

Pada pelaksanaan strategi pengembangan kebudayaan melayu, dilihat dari indikator target RPJPD kota Pekanbaru yakni,

**Tabel 1**  
**Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kota Pekanbaru**

<b>Sasaran Pokok RPJPD</b>	<b>Indikator dan Target RPJPD</b>
Mewujudkan lingkungan dan masyarakat yang berbudaya Melayu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya lembaga yang mendukung pemantapan budaya Melayu.</li> <li>2. Teraplikasinya budaya melayu pada semua aspek.</li> <li>3. Prinsip-prinsip dasar budaya melayu yang bersendikan Islam menjadi panutan masyarakat.</li> <li>4. Implementasi budaya Melayu dalam tunjuk ajar, prilaku, dan kearifan serta tata cara berpakaian Melayu yang Islami diseluruh lapisan masyarakat.</li> <li>5. Aspek estetika budaya Melayu dalam arsitektur dan</li> </ol>

	<p>taman kota yang menjadi ciri khas kota Pekanbaru dan membentuk karakter kota.</p> <p>6. Terciptanya toleransi, kerjasama dan suasana mesra antar multikultur sehingga menjadi energi yang serasi untuk mendukung pembangunan.</p> <p>7. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan budaya Melayu.</p>
--	--

**Sumber: RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025**

Berdasarkan indikator tersebut dapat diidentifikasi 5 aspek yang harus dianalisa yakni : (1) Penguatan lembaga kebudayaan, (2) Arsitektur bangunan kota Pekanbaru, (3) Urgensi peraturan daerah mengenai kebudayaan melayu, (4) Proses penanaman nilai budaya dan (5) Praktek kebudayaan melayu dalam masyarakat.

Berikut pemaparan analisa pembahasan kelima aspek ini:

a. Penguatan Lembaga Kebudayaan.

Penguatan terhadap kinerja lembaga dilihat dari 2 hal penting yakni; (1) Strategi yang berkesinambungan dengan visi, misi serta strategi pemerintah dan (2) Pembiayaan terhadap program kerja.

Kesinambungan visi ini terlihat dari visi dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu *“Terwujudnya Kota Pekanbaru Menjadi Pusat Kebudayaan Melayu dan Kota Wisata Bernuansa Melayu Berlandaskan Iman dan Taqwa”*. Visi ini diiringi dengan misi antara lain:

1. Melestarikan, membina dan mengembangkan budaya melayu ditengah-tengah masyarakat.
2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing dan pengembangan destinasi pariwisata bernuansa melayu.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Berdasarkan visi dan misi dinas ini, kita dapat melihat bahwa upaya pengembangan, dan pelestarian budaya melayu melalui pengembangan destinasi pariwisata yang bernuansa melayu. Untuk itu, dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru mensinergikan misi tersebut kedalam strategi pengembangan kebudayaan. Strategi Pengembangan Kebudayaan Melayu oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku seni dan budaya serta melaksanakan event-event seni dan budaya melayu.
- b. Pelaksanaan event-event wisata di Kota Pekanbaru dan mengikuti pameran pariwisata baik didalam maupun diluar negeri.
- c. Penguatan pengetahuan aparatur dan pelaku industry pariwisata serta masyarakat tujuan wisata dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pelaksanaan strategi kebudayaan ini diimbangi dengan pendanaan yang memadai melalui APBD. Porsi anggaran untuk pengembangan kebudayaan pun berkisar 40,03% dari total anggaran keseluruhan yang diberikan kepada dinas.

Selain dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru, Lembaga Adat Melayu (LAM) kota Pekanbaru juga harus diperkuat eksistensinya karena lembaga ini yang berfungsi melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat budaya Melayu. Dualisasi lembaga adat yang berada di kota Pekanbaru yakni LAM Riau dan LAM kota Pekanbaru membuat masyarakat membanding-bandingkan kinerja kedua lembaga ini. LAM Riau dinilai masyarakat lebih memiliki andil besar dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan melayu. Visi, misi dan strategi yang bagus dari LAM kota Pekanbaru yang bagus belumlah cukup jika perwujudan nyata berupa eksistensi kinerja serta kesekretariatan LAM tidak diketahui bahkan disadari masyarakat. Hingga tahun 2013 bangunan kesekretariatan LAM kota Pekanbaru belum selesai dibangun. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penyebab kinerja LAM kota Pekanbaru seakan tenggelam oleh eksistensi LAM Riau.

b. Arsitektur Bangunan Kota Pekanbaru.

Arsitektur bangunan kota Pekanbaru diatur dalam peraturan daerah nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kota Pekanbaru. Walikota Pekanbaru pada peraturan tersebut berkewenangan untuk menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur berkultur Melayu Riau. Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat, mahasiswa jurusan Teknik Universitas Riau pada tahun 2011 yang berjudul “Aplikasi Langgam Arsitektur Melayu Sebagai Identitas Kawasan Menuju Kota Berkelanjutan” dianalisa mengenai tingkat aplikasi langgam arsitektur melayu pada wajah kota Pekanbaru. Dari data yang didapat, diketahui bahwa hanya 31% bangunan di sepanjang jalan Jenderal Sudirman yang menggunakan langgam arsitektur melayu pada desain bangunannya.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tersebut menggambarkan bahwa tingkat penggunaan langgam arsitektur melayu masih rendah dan mayoritas diantara bangunan yang mengaplikasikan langgam arsitektur melayu tidak menerapkannya secara benar sesuai dengan filosofi nilai-nilai budaya melayu itu sendiri.

c. Urgensi Peraturan Daerah Mengenai Kebudayaan Melayu.

Sejauh ini peraturan daerah kota Pekanbaru membahas mengenai unsur kebudayaan antara lain;

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru.
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemakaian Busana Melayu Di Lingkungan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah.



3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011.
4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005 – 2025.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017.

Minimnya peraturan daerah yang menjadi instrument pedoman bagi pelaksanaan kinerja dinilai oleh dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu bentuk masih tersekatnya ruang gerak bagi dinas terkait dalam menjalankan kinerja dibidang kebudayaan. Hal ini dikarenakan peraturan daerah merupakan payung hukum yang akan memperkuat upaya terhadap pelaksanaan strategi perlindungan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan melayu.

d. Proses Penanaman Nilai Budaya.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan pendidikan masyarakatnya. Undang Undang No. 20 Tahun 2003, pasal 36 ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan tentang strategi, program, serta kebijakan pendidikan supaya berhasil guna dan berdaya guna untuk menuju pendidikan manusia bermutu. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk membekali anak didiknya materi kebudayaan melalui kurikulum muatan lokal. Untuk itu, pemerintah kota Pekanbaru khususnya dinas pendidikan kota Pekanbaru menjadikan muatan lokal menjadi salah satu mata pelajaran pada sekolah formal dari jenjang sekolah dasar hingga menengah. Akan tetapi penerapan mata pelajaran muatan lokal ini di kota Pekanbaru tidak terlalu efektif dalam memberikan pengaruh terhadap penanaman nilai budaya melayu karena jam pelajaran untuk materi ini hanya terbatas 2 jam selama seminggu dan materi yang disampaikan hanya berupa pengetahuan secara umum mengenai budaya melayu.

e. Praktek Kebudayaan Melayu Dalam Masyarakat.

Dalam pengembangan kebudayaan Melayu tidak hanya diperlukan antusiasme dari pemerintah saja akan tetapi juga diperlukan partisipasi dari masyarakat daerah itu sendiri. Bentuk partisipasi masyarakat seperti :

1. Penggunaan bahasa melayu

Penggunaan bahasa melayu di kota Pekanbaru, semakin sulit untuk ditemukan. Ini terbukti dengan penggunaan bahasa minang yang lebih dominan kita jumpai jika berada di pasar. Pasar merupakan pusat interaksi masyarakat sehingga jika kita ingin melihat bahasa apa yang digunakan pada kehidupan masyarakatnya bisa tercermin melalui pasar.

2. Penggunaan pakaian melayu

Sesuai dengan peraturan daerah, setiap hari jum'at penggunaan pakaian melayu digunakan dilingkungan pemerintah kota, pegawai negeri sipil dan dilingkungan sekolah. Penggunaan pakaian ini juga dilakukan pada setiap perayaan hari besar kota Pekanbaru seperti pada perayaan ulang tahun kota dan pada saat upacara adat perkawinan melayu.

3. Partisipasi sanggar kesenian dan kerajinan melayu terhadap event-event budaya melayu.

Pada tahun 2013 terdapat sekitar 53 sanggar kesenian yang terdaftar dan ada 33 orang pengrajin serta 2 dewan kesenian daerah dan 1 CV yang berkonsentrasi pada kelestarian kerajinan melayu. Sanggar-sanggar serta para pengrajin dilibatkan oleh pemerintah dalam setiap pelaksanaan event kebudayaan dan pariwisata. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya mengikuti keikutsertaan terhadap event-event yang ditaja oleh pemerintah akan tetapi juga berpartisipasi dalam memprakarsai kegiatan-kegiatan yang berunsur budaya seperti (1) Pemilihan duta pariwisata dan duta bahasa dan (2) mengadakan pertunjukan seni rakyat yang menampilkan tari melayu, lagu melayu, musik melayu, kompiang, rebana serta pembacaan sya'ir dan gurindam.

## **2. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kebudayaan Melayu di Kota Pekanbaru.**

Dalam sebuah pencapaian strategi, pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaiannya. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Kepemimpinan, (2) Koordinasi lembaga terkait, (3) Kompetensi sumber daya manusia, (4) Pembiayaan, (5) Sarana dan Prasarana.

Kepemimpinan seorang kepala daerah menjadi sebuah faktor penentu arah bagi tercapainya tujuan pemerintahan. Fokus kepemimpinan seorang walikota membuat hampir seluruh aspek pembangunan di arahkan kepada pencapaian fokus tersebut. Selama rentang waktu 2008-2013, terdapat 2 masa kepemimpinan walikota yang berbeda dengan fokus pemerintahan yang berbeda pula. Selama masa kepemimpinannya, fokus kepemimpinan Herman Abdullah ialah Kebersihan, Kenyamanan dan Keindahan Kota sedangkan walikota Firdaus menjadikan Pembangunan Infrastruktur sebagai fokus kepemimpinan pemerintahannya. Walaupun fokus kepemimpinan kedua walikota ini tidak ada yang menfokuskan kepada pencapaian pusat kebudayaan melayu akan tetapi strategi untuk melangkah pada pencapaian tujuan tersebut tetap ada. Melalui perencanaan strategik untuk mencapai visi kepemimpinan kedua walikota ini menuangkan perhatian terhadap perkembangan kebudayaan melalui strategi pembangunan. Untuk mencapai visi dibidang kebudayaan ini, pemerintah menunjuk dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru sebagai SKPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah.

SKPD yang bertanggungjawab yakni dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru melakukan koordinasi dalam upaya menjalankan strategi pemerintah

kota untuk pencapaian visinya sebagai pusat kebudayaan melayu. Bentuk koordinasi itu seperti:

1. Untuk sinkronisasi perencanaan dinas dengan perencanaan pemerintah daerah, dinas melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dalam merumuskan perencanaan strategik.
2. Untuk penanaman nilai budaya melayu, dinas kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan dinas pendidikan dan olahraga. Pola penanaman nilai melayu ini seperti mengajarkan tulisan melayu, pengetahuan seputaran kebudayaan melayu baik adat istiadat melayu, makanan khas melayu maupun pakaian melayu melalui mata pelajaran muatan lokal, selain itu, sekolah di kota Pekanbaru juga mengajarkan tarian serta nyanyian melayu.
3. Untuk penyelenggaraan event-event kebudayaan Melayu, disbudpar bekerjasama dengan Lembaga Adat kota Pekanbaru dan sanggar-sanggar kesenian Melayu.
4. Untuk menjaga kelestarian kerajinan melayu serta mengembangkan potensi pengrajin dilaksanakan oleh deskranasda kota Pekanbaru dan provinsi Riau.
5. Sementara untuk menaungi sanggar-sanggar dan mendata situs-situs budaya melayu dilakukan oleh disbudpar itu sendiri.

Selain faktor kepemimpinan dan koordinasi, dukungan pemerintah terhadap kebudayaan sangat diperlukan. Dukungan dari segi pembiayaan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam ikut serta mengembangkan kebudayaan setempat. Tanpa adanya faktor pembiayaan ini, suatu program kerja yang telah disusun oleh SKPD tidak akan berjalan secara optimal. Pembiayaan terhadap pos anggaran tersebut tentu saja memiliki urgensi dalam pencapaian tujuan secara optimal. Untuk melihat keseriusan pemerintah ini, peneliti menganalisa pembiayaan yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Pekanbaru. Berikut realisasi program rutin dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Pekanbaru setiap tahunnya yang digambarkan melalui daftar realisasi program dan kegiatan pada tahun 2012.

**Tabel 2**  
**Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Per 31 Desember Tahun 2012**

No	Program/ Kegiatan	Keuangan	
		Target	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	540.908.952	514.511.812
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	103.124.000	93.774.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.000.000	13.880.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.404.800	70.403.200
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	29.654.744	29.654.744

	Keuangan		
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.055.433.179	2.024.437.479
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	378.320.450	375.279.450
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.101.294.655	1.076.533.655
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.281.019.445	1.247.861.350
10	Program Pengembangan Kemitraan	505.519.470	499.367.970
<b>JUMLAH</b>		<b>6.079.679.695</b>	<b>5.945.703.660</b>
<b>SURPLUS ANGGARAN</b>		<b>133.976.035</b>	

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru*

Peneliti mengidentifikasi beberapa pos pembiayaan penting seperti pos peningkatan kualitas sumber daya manusia SKPD dan pos pengembangan program kerja. Berikut analisa pembiayaannya:

1. Pos anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru tidak mencerminkan suatu program peningkatan mutu karena dari ketiga program kerja utama di bidang sumber daya manusia, hanya terdapat satu program pelatihan yakni pelatihan bimbingan terhadap teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data tersebut, wajar bagi peneliti bila kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang paling mengkhawatirkan terhadap pelaksanaan pengembangan kebudayaan di kota Pekanbaru ini.
2. Dari pos anggaran tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah memberikan porsi pembiayaan yang besar untuk pengembangan program kerja dibidang kebudayaan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam pengembangan budaya melayu melalui berbagai kegiatan. Pos anggaran program pengelolaan kekayaan budaya memiliki pembiayaan terbesar yakni sekitar 2.055.433.179 dari total anggaran keseluruhan sebesar 6.079.679.695 yang artinya ada sekitar 40,03% dari anggaran keseluruhan dipusatkan kepada pos ini. Akan tetapi dari pembiayaan 2.055.433.179, pos sosialisasi pengelolaan kekayaan lokal daerah pada program pengelolaan budaya memiliki pembiayaan terbesar yakni sekitar 1.050.849.752.

Selain pembiayaan, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sarana dan prasarana dapat berupa fasilitas perkantoran, fasilitas modal berbentuk fisik benda maupun bangunan kesekretariatan. Dari segi pembiayaan fasilitas sarana prasarana SKPD sudah mendapatkan porsi yang layak. Akan tetapi, penyediaan sarana prasarana seharusnya tidak hanya difokuskan pada SKPD terkait akan tetapi juga lembaga-lembaga lainnya seperti LAM, sanggar kesenian serta pengrajin karena lembaga-lembaga ini juga berperan dalam tercapainya strategi pengembangan kebudayaan melayu di kota Pekanbaru.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Selama rentang tahun 2008-2013 pemerintah kota Pekanbaru telah mengalami 2 masa pergantian kepemimpinan dan ini berpengaruh pada strategi pengembangan kebudayaan melayunya karena visi, misi dan strategi tiap kepala daerah yang berbeda. Selain itu, fokus kepemimpinan tiap kepala daerah belum ada yang memfokuskan pada pengembangan budaya melayu sebagai tujuan utama kinerja pemerintahannya.
2. Pada proses pengembangan strategi kebudayaan melayu ini dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru. Sejauh ini SKPD telah melakukan berbagai koordinasi dengan beberapa lembaga terkait, baik itu lembaga formal seperti badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA), dan dinas pendidikan ataupun lembaga informal seperti Lembaga Adat Melayu kota Pekanbaru dan Deskransda kota Pekanbaru serta sanggar-sanggar kesenian yang terdaftar. Namun koordinasi yang dilakukan oleh SKPD ini masih belum optimal karena sejauh ini lebih besarnya masih berupa sosialisasi untuk partisipasi dalam event-event kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.
3. Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor yang terlemah sampai saat ini baik itu sumber daya yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kompetensi sumber daya manusia yang masih belum kompeten diakui oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru sebagai faktor utama yang menyebabkan situs cagar budaya melayu masih berada di Batu Sangkar. Selain itu, dari segi pengrajin dan pemerhati adat di kota Pekanbaru masih lebih didominasi oleh peran sumber daya dari provinsi Riau.
4. Dari segi pembiayaan, peneliti menilai besaran anggaran yang diterima oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru sudah memadai untuk meningkatkan aspek kualitas sumber daya manusia dinas dan sarana dan prasarana serta menjalankan program-program pengembangan kebudayaan. Porsi anggaran untuk pengembangan kebudayaan pun berkisar 40,03%..
5. Dari segi sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada sanggar seni dan pengrajin masih belum optimal. Selain itu, sarana dan prasarana untuk penanaman nilai kebudayaan melayu yang dilakukan oleh pihak sekolah masih belum cukup dapat memberikan efek kecintaan terhadap kebudayaan melayu.

Oleh karenanya, dengan melihat pencapaian pemerintah kota dengan strategi kebudayaan melayunya selama ini maka peneliti pesimis terhadap tercapainya visi kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan melayu pada tahun 2025 jika pemerintah tidak melakukan fokus yang berarti terhadap bidang kebudayaan ini.

## 2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka peneliti berusaha memberikan saran sebagai berikut guna meningkatkan progress pencapaian visi kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan melayu;

1. Pada kepemimpinan selanjutnya diharapkan kepala daerah menjadikan pengembangan kebudayaan melayu sebagai fokus pemerintahan pada kepemimpinannya agar terjadi perkembangan yang signifikan dibidang pencerminan kebudayaan melayu sebagai identitas kota Pekanbaru.
2. Peran Lembaga Adat Melayu kota Pekanbaru harus dapat dioptimalkan karena eksistensi lembaga ini akan mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pengembangan serta pelestarian kebudayaan melayu.
3. Peraturan daerah dibidang kebudayaan seperti perlindungan, pengembangan serta pemeliharaan situs cagar budaya dan penggunaan bahasa melayu harus disegerakan oleh pemerintah agar pelaksanaan pengembangan kebudayaan di kota Pekanbaru memiliki payung hukum yang kuat.
4. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan program-program kebudayaan yang dapat meningkatkan kesadaran serta ketertarikan masyarakat untuk melestarikan kebudayaan melayu.
5. Peningkatan kompetensi sumber daya tetap menjadi prioritas karena proses pengembangan kebudayaan memerlukan sumber daya yang kompeten yang dapat mengarahkan serta melaksanakan kebijakan dibidang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edi Wibowo, Saiful Bahri dkk. *Kebijakan Publik dan Budaya*. Yogyakarta: YPAPI
- Koentjaraningrat, dkk. 2007. *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. Adicita Karya Nusa: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu
- Peursen, C.A. Van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahardjo Adisasmita.2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sufian Hamim.2005. *Manajemen Strategi Dalam Pembangunan*. Pekanbaru: UIR Press
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017